

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan interpretasi yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini antara lain:

1. Perpolitikan Islam di Indonesia pasca reformasi mengalami dinamika yang cukup panjang. Pasca kejatuhan Orde Baru di tahun 1998, dimana kebebasan berorganisasi dibuka secara luas, banyak kelompok-kelompok Islam yang kemudian mendirikan partai politik bahkan sampai berjumlah 42 dari total partai yang mendaftar Pemilu dengan katagori-katagorinya antara lain: Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK) yang sekarang menjadi PKS, Partai Masyumi, Partai Umat Islam (PUI), dan masih banyak lagi partai-partai lainnya yang menggunakan asas Islam. Meski demikian partai politik Islam pasca reformasi selalu mengalami pasang surut

karena mengalami konflik internal dan perpecahan yang tidak berkesudahan bahkan hingga sekarang. Hal demikian dilatar belakangi oleh konflik kepentingan kelompok Islam dan adanya perbedaan strategi taktik dalam mewarnai perpolitikan Indonesia.

2. Penerapan politik moderasi di Indonesia dilakukan dengan beragam upaya oleh NU yang disokong oleh pemerintah. Karena bagaimanapun gagasan moderasi beragama ini menjadi penting karena ntidak hanya menyangkut soal teologis belaka, namun juga menyangkut keutuhan bangsa Indonesia yang amat beragam masyarakatnya. Adapun upaya-upaya yang ditempuh antara lain melalui lembaga pendidikan baik formal maupun informal, khususnya dipesantren dan madrasah, melalui diskusi yang dibuka secara luas serta tindakan-tindakan lainnya

## **B. Saran-Saran**

Dari penelitian yang berjudul “*Kiprah Partai Politik Islam di Indonesia Era Reformasi dalam Kerangka Moderasi dan Demokratisasi*” ini, maka penulis mengajukan beberapa

saran yang dapat digunakan untuk memberikan suatu rekomendasi terhadap beberapa elemen sebagai berikut:

1. Mendorong partai politik khususnya yang beraliran Islam, meskipun telah teralienasi oleh sistem ekonomi kapitalistik global yang berimplikasi pada tatanan kekuasaan yang menindas, menggunakan politik identitas dalam memerangi sistem tersebut tidaklah elok. Karena hanya akan melahirkan polarisasi yang mendalam dan menimbulkan kebencian satu sama lain.
2. Untuk dunia akademisi yang memiliki akses penuh terhadap mimbar-mimbar ilmiah alangkah baiknya terus menerus membedah secara fundamental mengenai peran-peran partai politik untuk dijadikan kajian bersama di dalam lembaga kependidikan yang kelak disosialisasikan kepada pemerintah, civitas akademika juga kepada khalayak untuk mendudukan peran fungsi partai politik secara benar dalam sebuah negara demokratis.